

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis diawali dengan identifikasi permasalahan - permasalahan pembangunan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Majene yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka identifikasi permasalahan pembangunan Kab. Majene untuk setiap urusan diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Bidang Ekonomi

A. Urusan Pertanian

1. Adanya kesenjangan antara produksi pertanian dengan potensi yang dimiliki
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan turunnya kuantitas produksi

3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi ,jalan produksi, serta perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran
 4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan khususnya lahan kritis
 5. Penurunan produktifitas akibat perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman & ternak
 6. Belum optimalnya penanganan pasca panen
 7. Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani
- B. Urusan Kehutanan
1. Pengelolaan kawasan hutan belum baik
 2. Penurunan fungsi hutan dan lahan
 3. Pengembangan investasi industri hasil hutan belum optimal
 4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
 5. Terjadinya perambahan hutan akibat aktifitas ladang berpindah masyarakat
 6. Masih terdapatnya permukiman masyarakat pada kawasan hutan lindung.
 7. Belum efektifnya keberadaan penyuluh
- C. Urusan Perikanan dan Kelautan
1. Rendahnya produksi perikanan budidaya
 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap

3. Minimnya penggunaan teknologi penangkapan di kalangan nelayan
 4. Terbatasnya akses pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan
 5. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat pesisir
 6. Rendahnya SDM nelayan
 7. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bom dan potasium
 8. Belum dimanfaatkannya Pusat Pelelangan Ikan
 9. Belum efektifnya keberadaan penyuluh
- D. Urusan Perindustrian & Perdagangan
1. Mutu produk industri kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain
 2. Kapasitas produksi masih kurang dibandingkan potensi
 3. Terbatasnya pusat – pusat industri kecil dan Menengah
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat sesuai standar Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
 5. Masih kurangnya pemanfaatan pasar – pasar tradisional
 6. Revitalisasi pasar sentral dan pusat pertokoan
- E. Urusan Koperasi & UKM
1. Minimnya peran lembaga keuangan dalam menyokong kegiatan perekonomian masyarakat

2. Koperasi belum dikelola secara profesional sesuai prinsip koperasi
 3. Pembinaan terhadap koperasi kurang optimal
 4. Masih rendahnya peranan koperasi & UKM dalam kegiatan ekonomi masyarakat
 5. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi
- F. Urusan Ketahanan Pangan
1. Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah
 2. Belum tersedianya peta regional rawan pangan
 3. Rendahnya produksi komoditi pangan daerah

4.1.2 Bidang Sosial Budaya

A. Urusan Pendidikan

1. Belum optimalnya implementasi Kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan dalam Wilayah Sulbar
2. Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil
3. Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata khususnya di wilayah perdesaan
4. Masih kurangnya sarana & prasarana pendidikan
5. Perlunya peningkatan mutu proses belajar mengajar

B. Urusan Kesehatan

1. Masih rendahnya derajat kesehatan penduduk kab. Majene
2. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
3. Prilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
4. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat
5. sarana & prasarana kesehatan belum memadai
6. Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas.
7. Distribusi Tenaga kesehatan belum merata

C. Urusan Pemuda dan Olah Raga

1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepemudaan
3. Belum maksimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah
4. Kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan

D. Urusan Budaya & Pariwisata

1. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya

2. Kurang optimalnya pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya.
 3. Terbatasnya even-even budaya yang berkualitas dapat mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah
 4. Pengelolaan potensi pariwisata belum optimal
 5. Rendahnya promosi pariwisata daerah
- E. Urusan Kependudukan & Catatan Sipil
1. Belum Optimalnya pelaksanaan layanan administrasi kependudukan
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validasi data kependudukan dan melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya
- F. Urusan Tenaga Kerja & Sosial
1. Masih rendahnya kesempatan & lapangan kerja
 2. Masih rendahnya kualitas & produktifitas tenaga kerja
 3. Belum terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
 4. Adanya kesenjangan antara tingkat kesejahteraan masyarakat kota dan pedesaan
 5. Masih rendahnya keterampilan para pencari kerja
- G. Urusan Perpustakaan & Kearsipan
1. Belum tersedianya bangunan perpustakaan dan arsip daerah

2. Belum optimalnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan di wilayah kab. Majene
3. Belum tersedianya system administrasi kerarsipan
4. Belum optimalnya inventarisasi arsip daerah
5. Masih kurangnya pelayanan kualitas dan kuantitas informasi perpustakaan

H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

1. Kurangnya kualitas SDM pemerintah desa dan aparat dalam hal mengenai pemerintahan desa
2. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan dalam proses pembangunan
3. Belum adanya Desa mandiri dan masih bergantung pada pemerintah kabupaten

4.1.3 Bidang Infra Struktur

A. Urusan Pekerjaan umum

1. Belum optimalnya pembangunan jalan, jembatan, drainase, Turap, talud & Bronjong
2. Belum Optimalnya sarana prasarana pengembangan jaringan irigasi dan rawa
3. Masih ada daerah perkotaan dan perdesaan yang belum terlayani infrastruktur akses air minum
4. Belum adanya lokasi wilayah strategis dan cepat tumbuh di kabupaten Majene

B. Urusan Perumahan

1. Belum teregulasinya Rencana Pembangunan Perkotaan
2. Penyelesaian masalah drainase untuk meminimalisir areal rawan banjir
3. Penyelesaian masalah kumuh perkotaan
4. Membentuk permukiman perkotaan yang sinergi dengan perencanaan kota
5. Memperbaiki perilaku masyarakat perkotaan dalam mengatasi masalah permukiman

C. Urusan Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Masih rendahnya daya tampung TPSS
3. Masih kurangnya sarana & prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah
4. Masih kurang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang representatif

D. Urusan Perhubungan

1. Tingginya tingkat kecelakaan pada ruas jalan provinsi
2. Kesemrawutan lalu lintas pada kawasan pasar sentral dan pasar tradisional
3. Belum efektifnya penggunaan terminal sebagai pusat kegiatan naik-turun penumpang angkutan umum

4. Masih minimnya sarana-prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan
5. Belum optimalnya pengelolaan parkir daerah
6. Belum optimalnya penarikan retribusi dari sektor perhubungan dalam menunjang kontribusi terhadap PDRB

E. Urusan Komunikasi & Informatika

1. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat
2. Belum optimalnya akses teknologi informasi dan komunikasi dari kota sampai ke desa
3. Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan system teknologi informasi

F. Urusan Tata Ruang

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan & pengelolaan penataan ruang
2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata ruang wilayah
3. Belum optimalnya pemanfaatan surat ijin mendirikan bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang

G. Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral

1. Masih banyaknya desa-desa terpencil yang belum tersentuh jaringan listrik
2. Tidak adanya pemeliharaan pembangkit listrik baik PLTMH maupun Tenaga air

3. Belum terealisasinya MOU potensi pertambangan antara pemerintah dengan pihak ketiga.
4. Belum adanya kepastian terhadap kelanjutan eksplorasi minyak oleh pihak PT. Exxon
5. Belum tergalinya potensi-potensi pertambangan dan mineral baru

H. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
2. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan Program penyelenggaraan pembangunan
3. Belum terbangunnya sinergitas antara dokumen perencanaan
4. Proses Musrenbang belum menumbuhkan Prakarsa Kemandirian Masyarakat dalam pemenuhan segala kebutuhannya

4.1.4 Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah

- A. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah
 1. Belum Optimalnya pelayanan Publik ke masyarakat
 2. Masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja

3. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja birokrasi
4. Belum efektifnya sistem birokrasi yang disertai dengan adanya intervensi politik
5. Belum optimalnya Penerapan Perda- perda
6. Belum optimalnya PAD berdampak pada ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
7. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas pengelolaan keuangan dan auditor daerah berdampak pada belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan dan pengawasannya
8. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak masyarakat
9. Masih Kurangnya BUMD dalam mengelola aset daerah
10. System Kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan mekanisme reward and punishment.
11. Belum di optimalkannya fungsi Diklat Daerah yang dapat menunjang profesionalisme & Kompetensi pegawai negeri
12. Belum tercapainya predikat wajar Tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan

B. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat
2. Kurangnya pembinaan, LSM, Ormas, dan OKP serta kegiatan politik daerah

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat dirumuskan Isu strategis dalam RPJMD Kab Majene Periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Identifikasi Isu strategis RPJMD

No	Urusan	Permasalahan	Isu
1	Pertanian	Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani	Kualitas Sumber Daya Manusia
	Kehutanan	Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani	
	Kelautan & Perikanan	- Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani tambak & nelayan - Rendahnya SDM Nelayan	
	Pendidikan	- Belum optimalnya implementasi Kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan dalam Wilayah Sulbar - Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil - Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata khususnya di wilayah perdesaan	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan mutu proses belajar mengajar - Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat kab. Majene - Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan - Prilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat - Pelayanan kesehatan yang berkualitas belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat - Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. - Distribusi Tenaga kesehatan belum merata 	
	Pemuda & Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepemudaan - Belum maksimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah - Kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan 	
	Tenaga Kerja & sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesempatan & lapangan kerja - Masih rendahnya kualitas & produktifitas tenaga kerja - Masih rendahnya keterampilan para pencari kerja 	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi - Belum optimalnya fungsi Diklat Daerah dalam menunjang profesionalisme & kompetensi pegawai negeri 	
2.	Urusan kesatuan bangsa politik dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat - Kurangnya pembinaan, LSM, Ormas, dan OKP serta kegiatan politik daerah 	Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan.
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Belum adanya Desa mandiri dan masih bergantung pada pemerintah kabupaten	
	Urusan Tenaga Kerja & Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesempatan & lapangan kerja - Masih rendahnya kualitas & produktifitas tenaga kerja - Belum terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin - Adanya kesenjangan antara tingkat kesejahteraan masyarakat kota dan pedesaan 	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
3	Urusan Budaya & Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya - Kurang optimalnya pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya. 	Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan
4	Urusan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya Alih fungsi lahan yang mengakibatkan turunnya kuantitas produksi - Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi, jalan produksi, serta perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran 	Percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar
	Urusan pendidikan	Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil	
	Urusan kesehatan	Sarana & prasarana kesehatan belum memadai	
	Urusan pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepemudaan 	
	Urusan Perpustakaan & Kearsipan	Belum tersedianya bangunan perpustakaan dan arsip daerah	
	Urusan pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembangunan jalan, jembatan, drainase, Turap, talud & Bronjong - Belum Optimalnya sarana prasarana pengembangan 	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
		jaringan irigasi dan rawa - Masih ada daerah perkotaan dan perdesaan yang belum terlayani infrastruktur akses air minum - Belum adanya lokasi wilayah strategis dan cepat tumbuh di kabupaten Majene	
	Urusan perumahan	- Penyelesaian masalah drainase untuk meminimalisir areal rawan banjir - Penyelesaian masalah kumuh perkotaan	
	Urusan Perhubungan	Masih minimnya sarana-prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan	
5	Urusan Pertanian	- Tingginya Alih fungsi lahan yang mengakibatkan turunnya kuantitas produksi - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan khususnya lahan kritis	Pembangunan Berkelanjutan
	Urusan Kehutanan	- Penurunan fungsi hutan dan lahan - Terjadinya perambahan hutan akibat aktifitas ladang berpindah masyarakat - Masih terdapatnya permukiman masyarakat pada kawasan hutan lindung.	
	Urusan Kelautan & Perikanan	Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bom dan potasium	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Urusan lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Masih kurang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang representatif 	
6	Urusan kependudukan & catatan Sipil	Belum Optimalnya pelaksanaan layanan administrasi kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	Urusan Perpustakaan & Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya system administrasi kerarsipan - Belum optimalnya inventarisasi arsip daerah 	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kualitas SDM pemerintah desa dan aparat dalam hal mengenai pemerintahan desa - Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan dalam proses pembangunan - Belum adanya Desa mandiri dan masih bergantung pada pemerintah kabupaten 	
	Urusan Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) - Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan Program penyelenggaraan pembangunan - Belum terbangunnya sinergitas antara dokumen perencanaan 	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja - Masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja - Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja birokrasi - Belum efektifnya sistem birokrasi yang disertai dengan adanya intervensi politik - Belum optimalnya Penerapan Perda- perda - Belum optimalnya PAD berdampak pada ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat - System Kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profisonalitas, kompetensi dan mekanisme reward and punishment. - Belum di optimalkannya fungsi Diklat Daerah yang dapat menunjang profesionalisme & Kompetensi pegawai negeri - Belum tercapainya predikat wajar Tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan 	
7	Urusan Pertanian	Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina petani untuk meningkatkan produksi petani	Pelayanan Publik

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Urusan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil - Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata khususnya di wilayah perdesaan - Masih kurangnya sarana & prasarana pendidikan - Perlunya peningkatan mutu proses belajar mengajar 	
	Urusan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya derajat kesehatan penduduk kab. Majene - Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan - Prilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat - Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat - Distribusi Tenaga kesehatan belum merata 	
	Urusan Pemuda & Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya. - Terbatasnya even-even budaya yang berkualitas dapat mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah - Pengelolaan potensi pariwisata belum optimal 	
	Urusan Kependudukan & Catatan Sipil	Belum Optimalnya pelaksanaan layanan administrasi kependudukan	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Urusan Perpustakaan & Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya bangunan perpustakaan dan arsip daerah - Masih kurangnya pelayanan kualitas dan kuantitas informasi perpustakaan 	
	Urusan Pekerjaan Umum	Masih ada daerah perkotaan dan perdesaan yang belum terlayani infrastruktur akses air minum	
	Urusan Lingkungan Hidup	Masih kurangnya sarana & prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah	
	Urusan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya sarana-prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan - Belum optimalnya pengelolaan parkir daerah 	
	Urusan komunikasi & informatika	Belum optimalnya akses teknologi informasi dan komunikasi dari kota sampai ke desa	
	Urusan Tata Ruang	Belum optimalnya pemanfaatan surat ijin mendirikan bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang	
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih banyaknya desa-desa terpencil yang belum tersentuh jaringan listrik	
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Belum Optimalnya pelayanan Publik ke masyarakat	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
	Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah		
	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	Kurangnya pembinaan, LSM, Ormas, dan OKP serta kegiatan politik daerah	
8	Urusan Budaya & Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan potensi pariwisata belum optimal - Rendahnya promosi pariwisata daerah 	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
	Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pemeliharaan pembangkit listrik baik PLTMH maupun Tenaga air - Belum terealisasinya MOU potensi pertambangan antara pemerintah dengan pihak ketiga. - Belum adanya kepastian terhadap kelanjutan eksplorasi minyak oleh pihak PT. Exxon - Belum tergalinya potensi-potensi pertambangan dan mineral baru 	
9.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah	Masih Kurangnya BUMD dalam mengelola aset daerah	Peningkatan peran lembaga keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan
	Urusan Perindustrian & Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mutu produk industri kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan 	

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Urusan	Permasalahan	Isu
		produk sejenis dari daerah lain - Kapasitas produksi masih kurang dibandingkan potensi - Terbatasnya pusat – pusat industri kecil dan Menengah	
	Urusan Koperasi & UKM	- Minimnya peran lembaga keuangan dalam menyokong kegiatan perekonomian masyarakat - Koperasi belum dikelola secara profesional sesuai prinsip koperasi - Pembinaan terhadap koperasi kurang optimal - Masih rendahnya peranan koperasi & UKM dalam kegiatan ekonomi masyarakat - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi	

Berdasarkan permasalahan per urusan di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Majene, yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan.
3. Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan
4. Percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
7. Pelayanan Publik

8. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
9. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan

Dengan melihat isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2012-2016, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas SDM, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK; peningkatan pelayanan kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam optimalisasi peningkatan kualitas SDM, pelayanan bidang pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah dan senantiasa teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Pengelolaan pendidikan merupakan penanaman investasi masa depan bangsa yang tidak bisa dikelola dengan asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Pendidikan harus berakar pada potensi lokal tetapi bergerak secara global. Penanganan masalah pendidikan difokuskan pada masalah :

- a. Persoalan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,

- b. Persoalan pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
- c. Persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik Pendidikan

Dilain sisi peranan sektor Kesehatan dalam eningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan Angka Kematian bayi, meningkatnya Angka harapan hidup, status gizi Masyarakat, cakupan sanitasi dasar, dan meningkatnya cakupan imunisasi pada balita serta Peningkatan kualitas hidup dan peran wanita dalam pembangunan. Dilain sisi Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas SDM serta pengembangan kapabilitas PNS melalui jenjang Pendidikan formal dan non formal sehingga mampu menciptakan suatu Peningkatan kinerja aparat pemerintah.

2. Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan

Akselerasi pembangunan bidang ekonomi, Kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, merupakan arahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melauai stabilitas politik dan keamanan yang kondusif sehingga sasarannya untuk dapat meningkatkan PDRB dalam menyokong perekonomian daerah, terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat, menurunnya Angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja, tersedianya produk hukum yang mendukung iklim investasi, penyelesaian kasus sengketa tanah dan tapal batas wilayah, meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum,

terselenggaranya program transmigrasi pada wilayah Kabupaten Majene serta terselenggaranya pembinaan pada bidang Kesejahteraan sosial.

3. Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan

Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan merupakan salah satu pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan, dalam hal ini untuk melestarikan nilai-nilai kearifan local dalam pembangunan daerah, pencegahan permasalahan SARA, meningkatkan peran tokoh agama dalam pembangunan, pelestarian cagar budaya, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dalam hal ini kualitas pengelolaan haji serta pengembangan sarana dan prasarana peribadatan yang mampu menjadi sumber motifasi dan inovasi dalam pembangunan.

4. Percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, merupakan prasarana pendukung pembangunan, harus ditingkatkan pembangunan dan pemeliharannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya dan akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Majene dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

5. Pembangunan berkelanjutan

Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping, dupkikasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program, dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya, harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan. Disamping itu, ke depan, pembangunan Kabupaten Majene harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan agar mampu mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan

Kabupaten Majene ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia di manapun. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Majene ke depan. Ke depan, pembangunan dilakukan dengan mensesuaikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek Administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki

kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga *citizen*, Masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*, Masyarakat bangsa.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan Masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam mengembangkan sistem Perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, Masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik sehingga Masyarakat mampu memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara periodik dan tepat.

Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik (*good governance*), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan

prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

7. Pelayanan Publik

Perilaku ideal pejabat negara sebagai service provider adalah kemampuannya memberikan pelayanan publik, dengan responsive, akuntabel, transparansi, dan efisien. Responsif, artinya memberikan pelayanan sesuai keinginan masyarakat, akuntabel artinya memberikan pelayanan secara transparan dan dapat diakses oleh semua orang, transparansi artinya pelayanan publik yang terbuka, jujur, dan berkeadilan, sementara efisiensi mengisyaratkan pelayanan yang murah, cepat, dan hemat tenaga.

8. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum Berkelanjutan dan relative mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Dengan menelaah kondisi sumber daya alam saat ini Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan

pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energy. ketiga krisis itu menjadi tantangan Jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan Dampak buruk bagi kehidupan Masyarakat.

Bertambahnya kebutuhan Lahan pertanian dengan menggunakan Lahan hutan akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat perladangan yang berpindah-pindah dan memburuknya penutupan Lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang menancam turunnya debit air dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan dari semua hal diatas adalah pengelolaan yang Berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembangunan *data base* juga harus mengakomodasi kebutuhan akan sistem informasi sumber daya alam (SDA). Dengan sistem informasi ini maka kebijakan dan implementasi pendayagunaan SDA secara lestari dapat terwujud.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas terhadap Masyarakat.

9. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan

Peningkatan peran kelembagaan keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan adalah aspek yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Majene ke depan. Upaya menggeser paradigma “memberi” ke “ pemberdayaan” disadari bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan Kabupaten Majene. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan secara bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat, dan perlahan membentuk sifat produktif, inovatif, kreatif pada masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan memperhatikan pertanian, pariwisata, industri kecil dan kekuatan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara, untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder atau tersier (industri dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan kejenuhan input.